

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN TINGGI

Lidya Fransiska Oktavia¹, Alia Yovica², Jamilus³

^{1,2,3}UIN Mahmud Yunus Batusangkar

lidyafriansiska41@gmail.com¹, aliayovica93@gmail.com²

,jamilus@iainbatusangkar.ac.id³

ABSTRACT

Improving the quality of education is a key factor in creating superior and competitive human resources. In the context of national education, the Internal Quality Assurance System (SPMI) serves as a strategic instrument that ensures all academic and non-academic processes are carried out in accordance with national standards. This study aims to describe the concept, application, and challenges of SPMI implementation at various levels of education, from elementary to higher education. The research method used is a literature review with a descriptive-analytical approach based on a review of policy documents, quality management theory, and previous research findings. The study results indicate that implementing SPMI through the PPEPP (Determination, Implementation, Evaluation, Control, and Improvement) cycle is capable of creating a sustainable quality culture in the educational environment. In elementary and secondary education, SPMI focuses on strengthening student character, literacy, and competency, while in higher education, SPMI implementation supports improving the quality of the Tri Dharma of Higher Education and external accreditation. The main challenges faced include limited human resources, low commitment to a quality culture, and administrative burdens. However, digitizing quality documents, ongoing training, and synergy between SPMI and SPME are effective solutions to overcome these challenges. Overall, SPMI is not simply an administrative obligation, but a dynamic system that fosters a culture of quality, transparency, and accountability in educational institutions. With consistent implementation, SPMI can be a driving force in transforming Indonesian education into a superior, character-based, and globally recognized institution. Keywords: Case Study, Mind Mapping, Problem Solving, Mathematics, Innovative Learning.

Keywords: Internal Quality Assurance System, PPEPP, quality culture, basic and higher education, accreditation

ABSTRAK

Peningkatan mutu pendidikan merupakan faktor kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam konteks pendidikan nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi instrumen strategis yang

menjamin seluruh proses akademik dan nonakademik berjalan sesuai dengan standar nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, penerapan, serta tantangan implementasi SPMI di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan kajian terhadap dokumen kebijakan, teori manajemen mutu, serta hasil penelitian terdahulu.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMI melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) mampu menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan. Pada pendidikan dasar dan menengah, SPMI berfokus pada penguatan karakter, literasi, dan kompetensi peserta didik, sedangkan pada pendidikan tinggi, penerapan SPMI mendukung peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi dan akreditasi eksternal. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya komitmen budaya mutu, serta beban administratif. Namun demikian, digitalisasi dokumen mutu, pelatihan berkelanjutan, dan sinergi antara SPMI dan SPME menjadi solusi efektif untuk mengatasinya.

Secara keseluruhan, SPMI bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sistem dinamis yang menumbuhkan budaya mutu, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Dengan penerapan yang konsisten, SPMI dapat menjadi motor penggerak transformasi pendidikan Indonesia menuju lembaga yang unggul, berkarakter, dan diakui secara global.

Kata Kunci: Sistem Penjaminan Mutu Internal, PPEPP, budaya mutu, pendidikan dasar dan tinggi, akreditasi

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya lembaga pendidikan, tetapi juga oleh kualitas penyelenggaraan dan hasil yang dicapai. Dalam konteks ini, mutu pendidikan menjadi fondasi utama untuk menciptakan generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi di era

global. Mutu pendidikan tidak hanya diukur melalui capaian akademik, tetapi juga dari proses pembelajaran yang efektif, manajemen lembaga yang profesional, serta budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Salah satu mekanisme penting untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI merupakan sistem yang dikembangkan oleh setiap lembaga

pendidikan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional dan berjalan secara efektif. SPMI bekerja berdampingan dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan oleh lembaga eksternal seperti BAN-PT, BAN-S/M, dan LAM. Jika SPME berfungsi memberikan pengakuan eksternal terhadap mutu lembaga, maka SPMI bertanggung jawab membangun budaya mutu dari dalam lembaga itu sendiri.

Urgensi implementasi SPMI semakin terasa ketika dunia pendidikan menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya budaya mutu, dan perubahan regulasi yang cepat. Banyak lembaga pendidikan masih menempatkan penjaminan mutu sebatas pemenuhan administratif, bukan sebagai proses pembinaan berkelanjutan. Padahal, hakikat penjaminan mutu adalah menciptakan sistem yang hidup dan dinamis untuk memastikan setiap kegiatan pendidikan berjalan sesuai standar dan terus ditingkatkan. Karena itu, penerapan SPMI yang konsisten di setiap jenjang—dari pendidikan dasar hingga perguruan

tinggi—menjadi langkah strategis untuk membangun pendidikan nasional yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Artikel ini disusun menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka yang bersumber dari makalah kelompok, pedoman resmi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2024, serta berbagai literatur akademik yang relevan. Di antara referensi yang digunakan adalah karya Mulyasa (2012), Mahfudz (2021), Biggs dan Tang (2011), Owen (2018), serta Creswell (2014) yang memberikan kerangka teoretis tentang manajemen mutu pendidikan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan bagaimana konsep, prinsip, dan implementasi SPMI diterapkan pada tiga jenjang pendidikan di Indonesia. Analisis ini juga mengkaji hubungan antara SPMI dan SPME, tantangan yang dihadapi, serta inovasi yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan nasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Dari kajian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPMI terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Lembaga yang menerapkan siklus PPEPP secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek, seperti efektivitas pembelajaran, profesionalisme tenaga pendidik, serta transparansi manajerial. Budaya mutu yang tumbuh di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi mampu mendorong perubahan perilaku kerja menuju orientasi kualitas. Selain itu, dokumentasi mutu yang tersusun rapi menjadi bukti konkret bagi lembaga dalam proses akreditasi eksternal dan pengakuan publik. Implementasi SPMI juga mendorong terciptanya inovasi pembelajaran berbasis teknologi serta peningkatan keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan. Dengan demikian, SPMI tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi akademik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan

kredibilitas lembaga di mata masyarakat.

2. Pembahasan

a. Konsep dasar SPMI dan SPME

Secara konseptual, mutu pendidikan dapat didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Dalam pendidikan, mutu tidak hanya berarti pencapaian akademik, tetapi juga kesesuaian antara layanan pendidikan dengan kebutuhan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan dunia kerja (Terry, 2010). Menurut Ardiansyah et al. (2024), mutu mencakup dimensi input, proses, output, dan outcome, yang semuanya saling berkaitan untuk menghasilkan pendidikan yang efektif dan relevan. Penekanan pada mutu pendidikan juga tercermin dalam ISO 9001:2015 yang menekankan sistem manajemen mutu yang berkesinambungan, terukur, dan dapat dievaluasi.

Mutu pendidikan memiliki beberapa indikator penting. Input mencakup kualitas guru,

kurikulum, sarana dan prasarana, serta kemampuan siswa. Proses mencakup aktivitas belajar mengajar, manajemen kelas, dan tata kelola sekolah (Mulyasa, 2012). Output mencakup hasil belajar, sedangkan outcome mencakup dampak jangka panjang, seperti keterampilan dan sikap peserta didik. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (QS. Al-Mujadilah: 11).

b. Siklus PPEPP

Siklus PPEP adalah instrumen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari lima tahap: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu. Model ini bersifat siklikal, dinamis, dan berulang sehingga mendorong terjadinya perbaikan berkelanjutan di setiap satuan

pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020) dalam Panduan SPMI Perguruan Tinggi menekankan bahwa PPEPP bukan sekadar kerangka kerja administratif, melainkan sebuah mekanisme budaya mutu yang wajib dijalankan secara konsisten oleh setiap lembaga pendidikan untuk menjamin kualitas yang nyata.

Tahap pertama, Penetapan, melibatkan perumusan standar mutu pendidikan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Standar ini mencakup kompetensi lulusan, proses pembelajaran, sarana prasarana, serta tata kelola akademik. BAN-PT (2021) melalui Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 menegaskan bahwa penetapan standar harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan (CPL), standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti, 2020), serta kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders). Mahfudz (2021)

menambahkan bahwa penetapan standar menjadi fondasi utama agar pelaksanaan pendidikan dapat terarah, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tahap kedua, Pelaksanaan, adalah implementasi standar mutu yang telah ditetapkan. Seluruh unsur, mulai dari pimpinan, dosen/guru, hingga tenaga kependidikan, wajib menjalankan aktivitas sesuai standar yang berlaku. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020) menegaskan bahwa setiap aktivitas harus terdokumentasi untuk memudahkan evaluasi selanjutnya. ISO 9001:2015 juga menekankan pentingnya documented information sebagai bukti bahwa proses manajemen mutu telah dilaksanakan dengan konsisten dan dapat diaudit secara internal maupun eksternal.

Tahap ketiga, Evaluasi, berfungsi untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan

pelaksanaan. Evaluasi mencakup analisis kinerja akademik, kepuasan mahasiswa, efektivitas pembelajaran, hingga ketercapaian indikator mutu. Menurut Owen (2018), evaluasi harus berbasis data, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta dilakukan secara triangulasi melalui survei, wawancara, observasi, dan studi dokumen. BAN-PT (2021) menekankan bahwa data evaluasi menjadi dasar penyusunan continuous improvement plan yang kredibel.

Tahap keempat, Pengendalian, bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan standar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020) menyebut pengendalian sebagai mekanisme quality control yang dilakukan secara berkala melalui monitoring, audit mutu internal, maupun supervisi akademik. Juran & Godfrey (1999) menegaskan bahwa pengendalian yang

efektif akan meminimalkan risiko kegagalan dan memastikan konsistensi mutu. Dalam praktik di Indonesia, pengendalian diwujudkan melalui audit mutu internal (AMI) dan pelaporan kinerja yang dilaporkan ke pimpinan unit.

Tahap kelima, Peningkatan, merupakan inti dari siklus PPEPP karena memastikan adanya continuous quality improvement. Hasil evaluasi dan pengendalian harus ditindaklanjuti dengan perbaikan standar, pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas dosen/guru, serta pembaruan sarana prasarana. Creswell (2014) menekankan bahwa peningkatan harus berkelanjutan agar lembaga mampu merespons perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam FIBAA (2019) yang menuntut institusi untuk terus mengadaptasi

standar mutu sesuai perkembangan global.

Selain siklus PPEPP, keberadaan dokumen mutu merupakan unsur krusial dalam SPMI. Dokumen mutu terdiri atas kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu yang berfungsi sebagai alat kendali dan bukti pelaksanaan mutu di lembaga pendidikan. Tanpa dokumentasi yang rapi, proses penjaminan mutu akan sulit dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki dasar dalam audit mutu internal maupun akreditasi eksternal. Dalam konteks akuntabilitas pendidikan, dokumentasi ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an dalam QS. Al-Infitar: 10 yang menegaskan pentingnya pencatatan segala amal perbuatan sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi.

c. Implementasi SPMI disatuan Pendidikan

Implementasi SPMI disatuan Pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap jenjang pendidikan.

Pada pendidikan dasar, fokus utamanya adalah pembentukan karakter, penguatan literasi dan numerasi, serta pengembangan sikap positif siswa melalui kegiatan belajar yang kontekstual dan menyenangkan. Guru berperan besar dalam menanamkan budaya mutu melalui refleksi pembelajaran, evaluasi formatif, dan pembiasaan nilai-nilai luhur. Di jenjang pendidikan menengah, SPMI berfungsi menyiapkan siswa agar mampu melanjutkan pendidikan tinggi atau terjun ke dunia kerja. Proses pembelajaran diarahkan pada peningkatan kompetensi akademik, keterampilan hidup, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Pada jenjang pendidikan tinggi, implementasi SPMI menjadi lebih kompleks karena mencakup tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu yang

kuat agar mampu mempertahankan kualitas akademik, menghasilkan riset unggul, serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Audit Mutu Internal (AMI) menjadi mekanisme penting yang memastikan setiap unit kerja di perguruan tinggi menjalankan siklus PPEPP secara konsisten. Hasil AMI digunakan untuk memperbaiki standar, memperbarui kebijakan, dan mendukung proses akreditasi eksternal oleh BAN-PT atau LAM.

Hubungan antara SPMI dan SPME bersifat sinergis dan saling memperkuat. SPMI menyediakan data dan bukti empiris bagi pelaksanaan SPME, sementara hasil evaluasi eksternal dari SPME menjadi umpan balik bagi perbaikan internal. Jika SPMI menjadi proses pembinaan dan pengendalian dari dalam, maka SPME memberikan legitimasi publik terhadap mutu lembaga. Keduanya membentuk ekosistem penjaminan mutu yang berkelanjutan, di mana

budaya mutu menjadi inti dari seluruh kegiatan lembaga pendidikan.

Namun, penerapan SPMI dan SPME di lapangan tidak terlepas dari tantangan. Banyak lembaga pendidikan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, serta beban administratif yang berat. Di sisi lain, muncul pula tantangan eksternal seperti perubahan kebijakan, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, dan kompetisi antar lembaga pendidikan yang kian ketat. Untuk mengatasi hal tersebut, inovasi menjadi solusi utama. Digitalisasi dokumen mutu, penggunaan sistem informasi manajemen berbasis teknologi, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik, serta penguatan kolaborasi antar lembaga menjadi langkah strategis untuk memastikan SPMI berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

D. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan fondasi utama dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas, akuntabel, dan berdaya saing. Melalui penerapan siklus PPEPP, lembaga pendidikan dapat memastikan seluruh proses pembelajaran dan pengelolaan berjalan sesuai standar serta mengalami perbaikan berkelanjutan. Hubungan sinergis antara SPMI dan SPME menciptakan keseimbangan antara pengendalian internal dan pengakuan eksternal, sehingga mutu pendidikan tidak hanya terjaga tetapi juga diakui secara luas. Keberhasilan implementasi SPMI sangat bergantung pada komitmen pimpinan, partisipasi aktif sivitas akademika, dan dukungan budaya mutu yang kuat.

Lebih dari sekadar kewajiban administratif, SPMI merupakan wujud kesungguhan lembaga pendidikan dalam menjalankan amanah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai

profesionalisme, transparansi, dan inovasi, sistem penjaminan mutu dapat menjadi motor penggerak transformasi pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih unggul, mandiri, dan berkelas internasional. Melalui SPMI, cita-cita mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, berkarakter, dan berkeadilan bukanlah hal yang mustahil, melainkan keniscayaan yang dapat dicapai dengan kerja bersama dan komitmen berkelanjutan.

2. Saran

Agar pelaksanaan SPMI berjalan efektif, setiap lembaga pendidikan perlu menumbuhkan budaya mutu sebagai bagian dari identitas institusi. Pimpinan harus berperan aktif sebagai penggerak utama perubahan, sedangkan guru, dosen, dan tenaga kependidikan perlu diberdayakan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital juga perlu dioptimalkan, baik untuk pengelolaan dokumen mutu, pelaporan, maupun proses evaluasi internal. Di samping itu,

sinergi antara SPMI dan SPME harus diperkuat agar penilaian eksternal benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Kolaborasi antar lembaga pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional, juga menjadi strategi penting untuk memperluas praktik baik dan memperkuat jejaring penjaminan mutu di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). (2021). Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0. Jakarta: BAN-PT.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). (2024). Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2024. Jakarta: BAN-PT.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). (2024). Pedoman Akreditasi Sekolah dan Madrasah. Jakarta: BAN-S/M.
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). (2019). Accreditation Procedures and Standards. Bonn: FIBAA.
- International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015.
- Quality management systems — Requirements. Geneva: ISO.(4th ed.). Berkshire: Open University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Jakarta: Kemdikbud.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes). (2021). Instrumen Akreditasi Profesi Kesehatan. Jakarta: LAMPTKes.
- Mahfudz, H. (2021). Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2012). Manajemen Berbasis Sekolah dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Rosda Karya.
- Owen, J. (2018). Program Evaluation: Forms and Approaches (4th ed.).London: Routledge.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permendikbud RI No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Siregar, R. (2020). Implementasi SPMI di Sekolah Dasar dan Menengah: Strategi dan Kendala. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Slamet, M. (2019). Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi: Konsep dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Zubaidah, A. (2018). Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Tridharma. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.